

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan perpolitikan saat ini sistem politik terus mengalami perkembangan. Dengan berbagai bentuk dan tahapan proses politik yang ada dapat berdampak terhadap setiap individu. Akan tetapi, pengaruh politik terhadap setiap orang akan berbeda.

Sebagai seorang warga negara yang baik tentu menjadi sebuah keharusan untuk memiliki kesadaran politik dan mampu memahami dunia politik dengan baik. Jalannya proses pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi birokrasi tentu tidak terlepas daripada perilaku politik masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan. Hal ini karena kehidupan warga masyarakat ditentukan oleh keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Maka keputusan politik merupakan hak warga masyarakat dalam menentukannya.

Semenjak demokrasi menjadi atribut utama negara modern, maka perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan secara normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan kehendak rakyat (*will of the people*) ini sebagai nilai yang tertinggi diatas kehendak negara (*will of the state*). Atas dasar prinsip-prinsip normatif yang demikian itu, dalam praktek kehidupan demokrasi, yang awal, lembaga legislatif yang memiliki posisi yang sangat strategis dan sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin tentang kedaulatan rakyat serta kedaulatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja yang mewakili

rakyat dan yang memiliki kompetensi untuk mengungkapkan kehendak rakyat (*will of the people*) dalam bentuk Undang-Undang (UU).

Pemilu adalah salah satu cara dalam menentukan siapa yang berhak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar negara termasuk di Indonesia, yang *notabene* merupakan masyarakat heterogen. Melalui pemilu memungkinkan semua pihak dapat terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Semangat demokrasi sangat sejalan dengan pemilu secara substansi atau “demokrasi substansial” yakni demokrasi dalam pengertian pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, kekuasaan (kedaulatan) tertinggi dipegang oleh rakyat..

Persyaratan minimum Negara demokrasi ialah dengan merealisasikan adanya pemilu. Suatu sistem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan apabila sudah terpenuhi beberapa karakteristik, seperti pemilihan umum yang fair dan periodik, pertanggungjawaban Negara di depan rakyat dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Perilaku politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan yang dilakukan itu pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian yakni fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat. Namun fungsi pemerintah maupun fungsi politik biasanya dilakukan oleh struktur tersendiri, yaitu supra struktur

politik bagi fungsi-fungsi politik pemerintahan dan infra struktur politik bagi fungsi-fungsi politik masyarakat.

Partisipasi politik di Indonesia menuntut tuntutan yang besar kepada perubahan sistem dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Partisipasi politik sebagai hal yang penting dalam perkembangan kehidupan bangsa dan Negara. Pertumbuhan partisipasi politik memerlukan tata nilai yang operasional (dimanifestasikan dalam bentuk perilaku nyata) yang menerima dan menghargai persamaan, keterbukaan dan perbedaan pendapat sehingga terjadi kesinambungan antara masyarakat dan pemerintah.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor penentu dalam perilaku politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran kadar seseorang terlibat dalam proses perilaku politik. Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya. Sebagai fenomena penggambaran diatas apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka perilaku politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka perilaku politik menjadi pasif dan apatis.

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi yang telah digunakan oleh sebagian besar dunia termasuk di Indonesia yang mana memiliki masyarakat heterogen. Melalui pemilihan umum maka memungkinkan semua pihak dapat

terakomodasi terhadap apa yang sebenarnya mereka inginkan dan cita-citakan sehingga menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Masyarakat merupakan komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu karena pada dasarnya kekuatan dalam pemilihan masyarakatlah yang dapat menentukan nasib bangsa dan Negara kedepannya.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum dan pemilukada. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman memilih pada pemilu sebelumnya. Namun, tidak adanya pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan dalam menyalurkan aspirasi politik, namun mereka tetap melaksanakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi hal yang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Dikatakan unik, karena perilaku pemilih pemula dengan antusiasme yang tinggi sementara keputusan yang belum bulat, menjadikan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi. Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum memiliki wawasan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang menyebabkan apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi politik kepentingan partai-partai politik.

Pemilih pemula memiliki perilaku yang masih labil dan belum memiliki pengetahuan yang luas mengenai arti penting dari Pemilu, Setiadjid menjabarkan karakteristik pemilih pemula; *pertama*, belum pernah memilih atau menentukan suara di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS); *kedua*, belum memiliki pengalaman dalam memilih; *ketiga*, memiliki sikap ingin tahu yang tinggi; *keempat*, kurang rasional; *kelima*, pemilih pemula cenderung penuh gejolak dan semangat, apabila tidak dikendalikan akan memberikan dampak pada masalah-masalah sosial didalam pemilu; *enam*, menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya cukup banyak; *tujuh*, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mencoba dan berpartisipasi dalam pemilu walaupun berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda (Setiadjid, 2010:20).

Selanjutnya, Setiadjid mengungkapkan bahwa pemilih pemula memiliki kedudukan dan makna strategis dalam Pemilu alasannya, *pertama*, secara ukuran jumlah, pemilih pemula mempunyai jumlah yang cukup banyak di dalam masyarakat; *kedua*, merupakan bagian dari pemilih yang memiliki pola yang rumit untuk diatur dan di prediksi; *ketiga*, lebih cenderung memilih sikap golput; *keempat*, masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat sesuai untuk menyalurkan aspirasi bagi pemilih pemula.

Namun, disadari pemilih pemula memiliki potensi dan permasalahan yang kompleks, yaitu heterogenitas baik umur, status sosial, maupun permasalahan aspirasi kepentingan dan karakter pribadi yang khas, yaitu dinamis, labil sensitif dan berani. Namun perilaku yang labil, sensitif dan mudah untuk dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh partai pendukung kontestan untuk meraih jumlah suara

sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali atau baru sekali menggunakan hak pilihnya, mereka kurang memiliki dasar tentang politik dan belum punya pengalaman dalam menggunakan hak suaranya (Rudini, 2014:109). Minimnya pengetahuan dan wawasan dalam politik dikarenakan tidak adanya pendidikan politik yang diajarkan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Sikap acuh terhadap kejadian ataupun fenomena politik yang terjadi merupakan salah satu penyebab pemilih pemula kurang memahami permasalahan politik yang terjadi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik menurut (Ramlan Surbakti, 2016:169) yaitu: (1) Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa; (2) lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan atau teman sebaya.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Surbakti bahwa keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku politik pemilih pemula. Didalam lingkungan keluarga pemilih pemula belajar berdemokrasi pertama kali. Faktor keluarga sangat mempengaruhi cara pandang mengenai seluk-beluk kehidupan yang ada disekitarnya, termasuk pendidikan politik diperoleh pertamakali dari ruang keluarga. Keluarga mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi secara emosional, sehingga faktor orangtua bisa membentuk perilaku pemilih sebagai pemilih pemula.

Selain daripada keluarga, pengaruh kelompok pergaulan atau teman sebaya, menjadi faktor yang harus dipertimbangkan, karena faktor eksternal ini bisa mempengaruhi informasi dan pendidikan politik. Teman sebaya atau kelompok pergaulan dipercaya tidak hanya bisa mempengaruhi persepsi dan tindakan positif tetapi juga dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan negatif. Sehingga kecenderungan perilaku politiknya berpotensi bahwa suatu hal tersebut adalah sama baik itu sifatnya, tingkah lakunya dan karakteristiknya dengan perilaku politik teman dekatnya.

Media masa, terutama media masa televisi mampu menyajikan sumber informasi politik kepada pemilih pemula secara efektif dan efisien, dalam hal ini para remaja atau pemilih pemula dalam sehari bisa menghabiskan waktu berjam-jam didepan televisi, meskipun tidak selalu menonton program yang berkaitan dengan politik, berselang-seling dengan hiburan yang ada di televisi, membedakan pemilih pemula dengan pemilih lainnya adalah soal pengalaman dan pengetahuan politik dalam menghadapi pemilu. Referensi yang dijadikan sandaran dalam melakukan pemilihan cenderung tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi yang melingkarinya.

Hal itu penting karena pemilih pemula adalah pemilih yang ikut andil menentukan pemimpin untuk selanjutnya/jangka panjang. Perilaku pemilih pemula menjadi indikator kualitas demokrasi secara substansial pada saat ini dan masa yang akan datang. Karena kondisinya masih labil dan mudah diberikan wawasan politik dan demokrasi secara benar dan baik dari suprastruktur politik

maupun infrastruktur politik. Maka pemilih pemula masih terbuka menjadi pemilih yang cerdas dan kritis dalam menentukan pemimpin.

Selain daripada itu, ada hal baru yang terjadi dalam pemilu tahun 2019 ialah Pemilu Serentak, dimana pemilih akan langsung memilih anggota legislatif dan Presiden/Wakil Presiden pada saat yang bersamaan. Jadi pada pemilu 2019, pemilih mendapatkan 5 surat suara, yang dibedakan dengan warna. Kelima surat suara ini adalah surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara anggota DPR RI, surat suara anggota DPD RI, surat suara anggota DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan diadakannya pemilu serentak ini tentunya akan menimbulkan pengalaman baru pula bagi para pemilih khususnya para pemilih pemula. Dengan diberlakukannya pemilu serentak yang mana pemilih harus mencoblos lima surat suara pada saat yang bersamaan akan membuat para pemilih merasakan sensasi yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya semisal kesulitan atau tantangan yang akan dihadapi. Jadi, dalam menghadapi pemilu serentak ini yang berbeda dari tahun-tahunse belumlahnya para pemilih pemula mendapati faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan pemilu serentak ini yaitu; (1) kesulitan dalam pelaksanaannya, (2) memiliki kecemasan atau rasa takut karena banyaknya surat suara yang harus di coblos pada saat yang bersamaan.

Dalam uraian latar belakang diatas, penulis melihat permasalahan perilaku politik pemilih pemula yang ada di Desa Sukadana Kabupaten Majalengka. Dengan masih adanya pengaruh ajakan keluarga yang sangat tinggi dan pengaruh

teman sebayanya atau kelompok pergaulan, sehingga dapat menghasut perilaku politik pemilih pemula untuk menentukan pilihannya sesuai dengan apa yang akan dipilih oleh keluarganya, dapat terhasut atau terpengaruh dengan ajakan orangtuanya dan tidak memilih apa yang akan dipilih oleh pemilih pemula dan awamnya pendidikan atau pengetahuan politik, kemudian lemahnya pengetahuan pemilih pemula terhadap pemilu. Selain itu dalam pelaksanaan pemilu serentak ini sedikit berbeda dimana para pemilih pemula harus mencoblos lima surat suara yang dibedakan dengan warna dalam waktu bersamaan sehingga memungkinkan mereka untuk merasakan beberapa kendala atau kesulitan dalam pelaksanaannya dan ini menjadikan faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan pemilu serentak yang dirasakan oleh para pemilih pemula di Desa Sukadana.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan itu berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini mengenai perilaku politik pemilih pemula yang dalam pelaksanaannya perilaku politik pemilih pemula ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor karena pemilih pemula cenderung memiliki karakteristik yang masih labil. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pemilih pemula ialah keluarga dan ajakan teman sebaya. Pemilih pemula pun dihadapkan pada pemilu yang berbeda di tahun 2019 yaitu Pemilu serentak dimana pemilih diharuskan untuk mencoblos lima surat suara dalam satu waktu yang dibedakan oleh warna. Dalam hal ini tentunya para pemilih pemula akan memiliki kendala atau penghambat dalam proses pelaksanaannya.

1.3 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang diajukan acuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku politik pemilih pemula di Desa Sukadana pada Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Majalengka?
2. Apa saja faktor pendorong perilaku politik pemilih pemula di Desa Sukadana Kabupaten Majalengka pada Pemilu Serentak 2019?
3. Apa saja faktor penghambat yang dialami pemilih pemula di Desa Sukadana Kabupaten Majalengka pada saat Pemilu serentak 2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih pemula di Desa Sukadana pada Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong perilaku politik pemilih pemula di Desa Sukadana Kabupaten Majalengka pada Pemilu Serentak 2019.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dialami pemilih pemula di Desa Sukadana Kabupaten Majalengka pada saat Pemilu serentak 2019.

1.5 Kegunaan Penelitian

Ada beberapa manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya dapat disusun sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Sumbangsih pemikiran penulis terhadap Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Sebagai bahan informasi ilmiah untuk para peneliti lainnya yang ingin mengetahui bagaimana perilaku politik pemilih pemula.
- c. Hasil penelitian dapat dipakai sebagai referensi penelitian selanjutnya.
- d. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.
- e. Menjelaskan bagaimana fenomena sosial politik yang ada.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi kita semua terutama bagi pemilih pemula dan pemerintahan di Desa Sukadana khususnya dan merupakan sumbangan pemikiran dalam memperkuat demokratisasi di berbagai daerah. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi rujukan dalam penelitian-penelitian di tempat lainnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam proses demokratisasi di Indonesia ditandai dengan lahirnya sistem multi partai atau berbagai jenis partai. Sistem multi partai ini adalah sistem kepartaian yang memiliki banyak partai. Dalam proses demokratisasi, rakyat dipandang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal ini terlihat melalui adanya sistem pemilu. Pemilihan umum merupakan suatu proses demokrasi secara langsung yang dilakukan oleh penduduk administratif yang memenuhi syarat. Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum dan pemilu kada.

Masyarakat yang memiliki hak untuk memilih adalah pelaku proses demokratisasi, dimana demokratisasi tersebut memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon yang sesuai dengan ideologinya masing-masing. Dalam memilih pasangan calon banyak sekali faktor-faktor yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam memilih pasangan calon. Hal ini dialami oleh berbagai lapisan masyarakat. Dari mulai masyarakat yang sangat paham mengenai dunia perpolitikan, hingga pada masyarakat yang tidak sama sekali memahami apa itu maksud serta tujuan dari perpolitikan. Dan belum lagi dengan masyarakat yang hanya sekedar latah dengan *trend* berpolitik yang sedang marak.

Masyarakat pemilih merupakan *rational voters* yang mempunyai tanggungjawab, kesadaran, kalkulasi, rasionalitas dan kemampuan control yang kritis terhadap kandidat pilihannya, yang memiliki ciri-ciri *traditional voters* yang fanatik, primordial dan rasional, serta berbeda dari *swinger voters* yang selalu ragu-ragu dan berpindah-pindah pilihan politiknya (Riyanto, 2004:143). Belum lagi penambahan dari masyarakat pemula atau pemilih pemula yang nota bene secara kuantitatif pemilih pemula ini merupakan pemilih yang potensial. Karena pemilih pemula adalah subjek partisipasi dan bukan objek mobilisasi.

Perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya bisa jadi dikarenakan ketertarikan pada objek atau raga tertentu setelah melihat, mengetahui serta mengenal. Atau bisa juga dikarenakan oleh dorongan setelah memperhatikan objek raga dengan sungguh-sungguh dan menetapkan untuk tidak suka, tidak tertarik dan tidak memilih ataupun sebaliknya.

Hasil dari perilaku pemilih secara keseluruhan dalam sebuah pemilu apabila digabungkan akan menghasilkan sebuah hasil yang berubah, baik itu dimulai dari jumlah pelaksana pemilih hingga pada hasil pemilu yang dilakukan oleh pelaku pemilih. Dalam pendekatan perilaku (*behaviorisme*), individu adalah secara aktual yang harus melakukan kegiatan politik dan mengendalikan lembaga politik. Tindakan dan keputusan politik, sebetulnya tidak hanya ditentukan oleh fungsi yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan, tetapi dipengaruhi oleh keinginan/harapan, dorongan, persepsi, motivasi, sikap dan orientasi individu yang membuat keputusan itu (Arifin, 2002:102).

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan (Firmanzah, 2007:102).

Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik dan seorang pemimpin (Firmanzah, 2007:105).

Perilaku pemilih dapat ditujukan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi wakil rakyat dalam pemilu secara langsung. Pemberiansuara atau *voling* secara umum dapat diartikan sebagai; “sebagai sebuah proses dimana seorang anggota dalam suatu kelompok menyatakan pendapatnya dan ikut menentukan konsensus diantara anggota kelompok seorang pejabat maupun keputusan yang diambil” (Gosnel F Horald, 1934:32). Pemberian suara dalam pemilu secara langsung diwujudkan melalui pemberian suara pada calon wakil rakyat yang didukungnya atau ditunjukkan dengan perilaku masyarakat dalam memilih wakil rakyat.

Adapun perilaku pemilih menurut Surbakti adalah “Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or note vote*) didalam suatu pemilihan umum (Surbakti, 1997:170).

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum dan pemilu. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman memilih pada pemilu sebelumnya. Namun, tidak adanya pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan dalam menyalurkan aspirasi politik, namun mereka tetap melaksanakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi hal yang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Katakan unik, karena perilaku pemilih pemula dengan antusiasme yang tinggi sementara keputusan yang belum bulat, menjadikan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi. Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum memiliki wawasan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang menyebabkan apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi politik kepentingan partai-partai politik.

Untuk melihat perilaku politik pemilih pemula, Pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi dan juga pendidikan yang menyeluruh kepada masyarakat upaya menjadikan masyarakat yang cerdas, paham dan mengerti untuk memilih calon wakil rakyat. Dan juga karena kurangnya interaksi pemerintahan setempat dengan masyarakat mengakibatkan sebagian masyarakat kurang paham dengan

intansi pemerintahan. Pemerintah sebagai lembaga pengayom masyarakat seharusnya dapat mengatasi ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik dalam pelaksanaan pemilu.

Oleh sebab itu pemerintah harus bisa berbaur dengan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang paham dan cerdas dalam menentukan pilihan. Perilaku sosial individu dan juga masyarakat dalam kecenderungan peranannya (*role dispotion*) dapat dikatakan memadai, manakala menunjukkan ciri-ciri respon interpersonal dan personal diantaranya; yakin akan kemampuannya dalam bergaul secara sosial, memiliki pengaruh yang kuat terhadap sebaya, mampu memimpin teman-teman dalam kelompok, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain dalam bergaul.

Seperti halnya teori yang dikemukakan oleh Weber mengenai teori tindakan sosial atau teori pilihan rasional; tindakan sosial bagi Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan oranglain (Ritzer, 1992: 86). Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif tersebut ke dalam empat tipe. Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe, semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami: (Ritzer, 2011:126).

Weber seterusnya membedakan empat jenis tindakan:

1. Tindakan Rasional Instrumental (*Zweck Rational*)

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan kesediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya: seorang siswa yang sering terlambat dikarenakan tidak memiliki alat transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang ke sekolah lebih awal dan tidak terlambat. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain.

2. Tindakan Rasional Nilai (*Werk Rational*)

Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contoh: perilaku beribadah atau seseorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki.

3. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya: hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta atau sedang

dimabuk asamara. Tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari luar yang bersifat otomatis.

4. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dan gerak moyang tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.. Contoh tindakan bercorak tradisi adalah upacara agama.

Kedua tipe tindakan yang terakhir sering hanya menggunakan tanggapan secara otomatis terhadap rangsangan dari luar. Karena itu tidak termasuk ke dalam jenis tindakan yang penuh arti.



Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran

